

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN VARIABEL MODERATING
PARTISIPASI MASYARAKAT, AKUNTABILITAS PUBLIK DAN
TRANSPARANSI
KEBIJAKAN PUBLIK
(Studi Empiris Pada Anggota DPRD Kabupaten Jember)**

*THE EFFECT OF COUNCIL KNOWLEDGE ABOUT BUDGETING
ON THE BUDGET SUPERVISION OF TERRITORY WITH
MODERATING VARIABLE PUBLIC PARTICIPATION,
PUBLIC ACCOUNTIBILITY AND TRANSPARENCY
OF PUBLIC POLICY
(EMPIRICAL STUDY ON LOCAL LEGISLATORS JEMBER)*

Tri Susanti Wulandari
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan No. 37, Jember 68121
E-mail: susan_wu2012@yahoo.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah yang dimoderasi oleh partisipasi masyarakat, akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan publik. Objek penelitian ini adalah anggota dewan DPRD Kabupaten Jember dengan jumlah populasi 50 orang anggota dewan. Pengambilan sampel menggunakan metode *simple random sampling*, sehingga dari jumlah populasi hanya 44 orang yang dijadikan sampel. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diantar langsung oleh peneliti. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS.

Terdapat beberapa kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Pertama, pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Kedua, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Ketiga, akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Keempat, transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Kata kunci : Pengawasan Keuangan Daerah, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Publik, dan Transparansi Kebijakan Publik

Abstract

The purpose of this study was to examine whether knowledge about the council budget affects the area of financial control are moderated by the community participation, public accountability and transparency of public policy. Object of this study is a board member parliament Jember, with a population 50 councilors. Sampling using simple random sampling method, so that the total population of only 44 people who were sampled. Methods of data collection using questionnaires hand delivered by the researcher. Data analysis method used is multiple linear regression with SPSS.

There are several conclusions from the results of testing this hypothesis. First, knowledge about the council budget affects the area of financial control. Second, public participation does not affect the relationship of the budget to the board knowledge of financial control area. Third, public accountability does not affect the relationship of the budget to the board knowledge of financial control area. Fourth, transparency of public policy does not affect the relationship of the budget to the board knowledge of financial control area.

Keywords: *Regional Finance Controller, Knowledge About the Budget Council, Public Participation, Public Accountability, and Public Policy Transparency.*

Pendahuluan

Sejak reformasi, pengelolaan keuangan daerah mendapat perhatian besar dari pemerintah karena adanya kebijakan baru yang mereformasi berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menyebabkan daerah-daerah di Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan daerahnya masing-masing (otonomi daerah). "Pengawasan keuangan negara adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan (Ulum, 2009:129)". Pengertian dari pengawasan keuangan negara tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi pengawasan keuangan daerah, hanya saja berbeda pada objek. Pengawasan ini sangat penting peranannya dalam melakukan pekerjaan atau tugas pemerintahan, karena dengan adanya pengawasan, tujuan yang akan dicapai dapat dilihat pada rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Selain itu, pengawasan ini berguna untuk mengetahui apakah program yang telah dijalankan telah sesuai dengan rencana atau tidak. Dan pengawasan keuangan daerah ini dipercayakan kepada anggota DPRD.

Dengan adanya tanggungjawab tersebut diharapkan anggota dewan memiliki pengetahuan lebih tentang anggaran, baik dalam penyusunannya, pengawasan dan penggunaannya. Oleh karena itu, aparat pemerintah yang berwenang dalam mengelola keuangan harus memiliki pengetahuan yang lebih tentang anggaran, agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran dianggap perlu, karena dengan adanya partisipasi masyarakat akan membantu anggota dewan dalam memberikan masukan mengenai kebutuhan masyarakatnya. Peranan akuntabilitas dalam masyarakat juga penting untuk memberikan bukti atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dananya berasal dari masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap anggota dewan. Berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan daerah harus dapat terpenuhi guna meningkatkan transparansi berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap anggota dewan legislatif dalam melakukan pengawasan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Sopanah dan Mardiasmo (2003). Penelitian yang dilakukan Sopanah dan Mardiasmo (2003) menyimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan mengubah sampel penelitian dan menambahkan variabel akuntabilitas publik sebagai variabel moderating.

Seperti yang diberitakan di media *online* Jember Post bahwa APBD Jember 2014 meningkat. "Tidak tanggung-tanggung, kenaikan Belanja Daerah hamper mencapai setengah triliun. Dimana tahun 2013 ini Belanja Daerah di APBD awal ditetapkan 2,3 Triliun, naik menjadi 2,75 Triliun di tahun 2014 nanti. Namun segi positifnya PAF Jember juga meningkat dari 350an Milyar tahun 2013

menjadi 459 Milyar di tahun 2014 nanti" (Pon/Sal). Selain itu, anggaran pengadaan lampu hias dinilai sangat tinggi sehingga dikhawatirkan adanya *mark up* atas anggaran tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah?
3. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah?
4. Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah?

Penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) menyatakan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap pengawasan APBD yang dilakukan anggota dewan. Interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Sedangkan, interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Penelitian Juliastuti (2013) menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Penelitian Pramita dan Andriyani (2010) menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Interaksi akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan interaksi transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Dari uraian di atas, peneliti dapat mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁ : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

H₂ : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

H₃ : Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

H₄ : Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember yang beranggotakan 50 orang. Penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling* dengan jumlah sampel 44 orang yang dihitung menggunakan Rumus *Slovin* (Riduwan, 2005:65) :

$$n = N/N(d)^2 + 1$$

$$n = 50/50(0,05)^2 + 1$$

$$n = 44,44$$

dimana :

n : sampel

N : populasi

d : nilai presisi 95% atau sig. 5%

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan yang dijawab langsung oleh responden terhadap kuesioner yang dibagikan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode survey melalui kuesioner yang dibagikan secara langsung dan menjemput langsung kepada responden. Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan kategori skor :

1. Kategori Sangat Setuju (SS) skor 5
2. Kategori Setuju (S) skor 4
3. Kategori Tidak Tahu (TT) skor 3
4. Kategori Tidak Setuju (TS) skor 2
5. Kategori Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel dalam pengukurannya. "Variabel dependen atau variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen" (Indriantoro dan Supomo, 1999:63). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah (Y) yang diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin dan kuesioner yang digunakan diadopsi dari penelitian Pramita dan Andriyani (2010).

"Variabel independen atau variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain" (Indriantoro dan Supomo, 1999:63). Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan dewan tentang anggaran (X_1) yang diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin dan kuesioner yang digunakan diadopsi dari penelitian Pramita dan Andriyani (2010) yang mengacu pada penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) dan Rosseptalia (2006).

"Variabel moderating yaitu tipe variabel-variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen" (Indriantoro dan Supomo, 1999:64). Variabel moderating dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat (X_2), akuntabilitas publik (X_3) dan transparansi kebijakan publik (X_4). Partisipasi masyarakat diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin dengan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Pramita dan Andriyani (2010) yang mengacu pada penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) dan Rosseptalia (2006). Akuntabilitas publik diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin dengan kuesioner yang diadopsi dari

penelitian Sopanah dan Wahyudi (2010). Transparansi kebijakan publik diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin yang diadopsi dari penelitian Pramita dan Andriyani (2010) yang mengacu pada penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) dan Rosseptalia (2006).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS dengan tingkat signifikan pengujian hipotesis 5%. Berikut persamaan regresi linier berganda :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_1 X_2 + \beta_3 X_1 X_3 + \beta_4 X_1 X_4 + e$$

Dimana :

Y : pengawasan keuangan daerah

α : konstanta

β : koefisien regresi

X_1 : pengetahuan dewan tentang anggaran

X_2 : partisipasi masyarakat

X_3 : akuntabilitas publik

X_4 : transparansi kebijakan publik

$X_1 X_2$: hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat

$X_1 X_3$: hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas publik

$X_1 X_4$: hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik

Hasil Penelitian

Analisis Data Statistik Deskriptif

Berikut ini disajikan statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan data tentang karakteristik responden.

Tabel 4.1 Statistik Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

No.	Keterangan	Σ kuesioner
1	kuesioner yang disebar	44
2	kuesioner yang kembali	39
3	kuesioner yang tidak kembali	5
4	kuesioner yang tidak lengkap	6
5	kuesioner yang diolah	33
	Respon (Prosentase)	75%

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	29	87.9
	Perempuan	4	12.1
	Total	33	100.0
2	Usia		
	≤ 30 tahun	1	3.0
	31 - 40 tahun	8	24.2

	41 - 50 tahun	17	51.5
	≥ 50 tahun	7	21.2
	Total	33	100.0
3	Pendidikan Terakhir		
	SMA	4	12.1
	SMK	-	0.0
	D1 / D2 /D3	1	3.0
	S1	20	60.6
	S2	8	24.2
	S3	-	0.0
	Total	33	100.0
4	Keikutsertaan Pelatihan tentang Keuangan Daerah		
	Belum Pernah	2	6.1
	1 kali	11	33.3
	2-3 kali	9	27.3
	4 kali atau lebih	11	33.3
	Total	33	100.0
5	Pengalaman Politik		
	< 2 tahun	2	6.1
	2 - 5 tahun	5	15.2
	> 5 tahun	26	78.8
	Total	33	100.0
6	Pengalaman Anggota DPR/DPRD		
	Satu Periode	19	57.6
	Dua Periode	12	36.4
	Lebih dari dua periode	2	6.1
	Total	33	100.0

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah anggota DPRD Kabupaten Jember. Data responden yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data-data sebagai berikut : Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan Terakhir, Keikutsertaan Pelatihan tentang Keuangan Daerah, Pengalaman Politik, dan Pengalaman menjadi Anggota DPR/DPRD. Jumlah kuesioner yang dibagikan dalam penelitian ini sebanyak 44 eksemplar, namun hanya 39 eksemplar yang kembali dan yang dapat diolah hanya 33 eksemplar, sedangkan yang tidak kembali 5 eksemplar dan yang tidak lengkap 6 eksemplar.

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Dev
X ₁	32	56	42.73	4.926
X ₂	18	32	23.64	2.547
X ₃	22	34	27.52	2.600

X ₄	14	25	17.36	2.119
Y	22	47	37.15	5.386

Dari 33 responden, pengetahuan tentang anggaran yang dimiliki anggota dewan yang terkecil (minimum) adalah 32 dan pengetahuan yang terbesar (maksimum) adalah 56 dengan rata-rata 42,73 dan standar deviasi sebesar 4,926. Partisipasi masyarakat menurut persepsi anggota dewan berada pada nilai terkecil (minimum) sebesar 18 dan terbesar (maksimum) 32 dengan rata-rata 23,64 dan standar deviasi 2,547. Akuntabilitas publik dalam penelitian ini memiliki nilai minimum sebesar 22 dan maksimum 34 dengan rata-rata 27,52 dan standar deviasi 2,600. Transparansi kebijakan publik memiliki nilai minimum sebesar 14 dan maksimum sebesar 25 dengan rata-rata 17,36 dan standar deviasi 2,119. Pengawasan keuangan daerah memiliki nilai minimum sebesar 22 dan maksimum sebesar 47 dengan rata-rata 37,15 dan standar deviasi 5,386.

Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas alat ukur penelitian ini menggunakan korelasi *product moment pearson's* yaitu dengan cara mengkorelasikan tiap pertanyaan dengan skor total, kemudian hasil korelasi tersebut dibandingkan dengan angka kritis taraf signifikan 5% dan r_{tabel} pada $n = 33$ sebesar 0,349.

Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten. Suatu pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang jelas mudah dipahami dan memiliki interpretasi yang sama meskipun disampaikan kepada responden yang berbeda dan waktu yang berlainan. Hasil pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	α	Ket
1	Pengetahuan dewan tentang anggaran (X ₁)	0,811	Reliabel $\alpha > 0,6$
2	Partisipasi masyarakat (X ₂)	0,670	
3	Akuntabilitas publik (X ₃)	0,655	
4	Transparansi kebijakan publik (X ₃)	0,674	
5	Pengawasan keuangan daerah (Y)	0,832	

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel, karena memiliki nilai Cronbach Alpha (α) lebih besar dari 0,60. Sesuai yang disyaratkan oleh Nunnally dalam Ghazali (2005: 41) bahwa suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha $> 0,60$.

Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan model empiris yang tepat maka koefisien regresi harus memenuhi syarat *Best Linear*

Unbiased Estimation (BLUE). Untuk memperoleh hasil koefisien yang BLUE harus memenuhi asumsi klasik yaitu data berdistribusi normal atau mendekati normal, tidak ada multikolinearitas, tidak heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi.

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006). Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnovtest* dengan menetapkan derajat keyakinan (α) sebesar 5%. Adapun hasil pengujian dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas

Variabel	Nilai <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	Sig.	Keterangan
Residual	0,458	0,985	Berdistribusi Normal

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas atau signifikansi untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti terjadi interkorelasi antar variabel bebas yang menunjukkan adanya lebih dari satu hubungan linier yang signifikan. Apabila koefisien korelasi variabel yang bersangkutan nilainya terletak di luar batas-batas penerimaan (*critical value*) maka koefisien korelasi bermakna dan terjadi multikolinearitas. Apabila koefisien korelasi terletak di dalam batas-batas penerimaan maka koefisien korelasinya tidak bermakna dan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.7 Collinearity Statistic

Variabel	VIF	Keterangan
X ₁	4,694	vIF < 10 Tidak ada multikolinearitas
X ₁ _X ₂	2,368	
X ₁ _X ₃	4,122	
X ₁ _X ₄	1,693	

Berdasarkan hasil analisis *Collinearity Statistic* diketahui bahwa dalam model tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat pada lampiran 6 dimana nilai VIF dari masing-masing variabel kurang dari 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas adalah uji glejser yang dilakukan dengan cara melakukan regresi varian gangguan (residual) dengan variabel bebasnya sehingga didapat nilai P. Untuk mengetahui adanya gejala gangguan atau tidak adalah apabila nilai P > 0,05, berarti menunjukkan tidak terjadi gangguan dan begitu pula sebaliknya.

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Variabel	t _{hitung}	Sig.	Keterangan
X ₁	0,512	0,588	Non Heteroskedastisitas
X ₁ _X ₂	0,060	0,430	Non Heteroskedastisitas
X ₁ _X ₃	0,801	0,952	Non Heteroskedastisitas
X ₁ _X ₄	-0,548	0,613	Non Heteroskedastisitas

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa t statistik menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dimana variabel dependen yaitu e_i atau *error absolut*, hal ini dapat dibuktikan dengan diperolehnya nilai signifikansi untuk masing-masing variabel yang lebih besar dari 0,05 (P > 0,05). Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas pada persamaan regresi yang diuji.

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian regresi linear berganda berguna untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel independen yang terdiri dari pengetahuan dewan tentang anggaran (X₁) terhadap variabel dependen yaitu pengawasan keuangan daerah (Y) dengan melibatkan variabel moderasi yang terdiri dari partisipasi masyarakat (X₂), akuntabilitas publik (X₃), dan transparansi kebijakan publik (X₄). Berdasarkan pengujian diperoleh hasil yang dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda

Variabel	Koef. Regresi	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	Keterangan
Konstanta	16,776	1,783	2,042	0,085	-
X ₁	0,323	2,815	2,042	0,042	Signifikan
X ₁ _X ₂	-0,007	-0,798	2,042	0,431	Tidak Signifikan
X ₁ _X ₃	-0,006	-0,724	2,042	0,475	Tidak Signifikan
X ₁ _X ₄	0,028	2,035	2,042	0,224	Tidak Signifikan
R					= 0,467
R Square					= 0,218
Standar Error					= 5,092
F _{hitung}					= 1,949
F _{sig}					= 0,001
N					= 33

Berdasarkan hasil tersebut dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 16.776 + 0,323X_1 - 0,007X_{1-X_2} - 0,006X_{1-X_3} + 0,028X_{1-X_4} + e$$

Uji F

Uji F dalam penelitian ini dimaksudkan untuk uji kelayakan model yang harus dilakukan dalam analisis regresi linier. Uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi

yang digunakan signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika $p \text{ value} < (\alpha) = 0.05$ dan $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis, dengan tingkat kepercayaan 95%.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F sebesar 1,949 dengan nilai signifikansi 0,001 (pada Tabel 4.9). Nilai signifikansi yang lebih kecil daripada 0,05 hal ini berarti model regresi yang diperoleh dari pengujian signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis.

Uji t

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Caranya adalah dengan membandingkan nilai statistik t_{hitung} dengan nilai statistik t_{tabel} dengan tingkat signifikan (α) yang digunakan yaitu 5%. Masing-masing variabel bebas dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) apabila t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau apabila probabilitas $< 5\%$ (α).

Hasil perhitungan uji t dengan menggunakan program *SPSS for Windows* dapat dilihat pada Tabel 4.9. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut:

a. Pengaruh variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (X_1) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y)

Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa t_{hitung} untuk variabel pengetahuan dewan tentang anggaran lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar $2,815 > 2,042$ dan tingkat probabilitas $< \alpha$ yaitu $0,042 > 0,05$. Karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dan tingkat probabilitasnya lebih besar dari 5%, maka H_0 ditolak, berarti variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah tidak terbukti kebenarannya (H_1 diterima).

b. Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran (X_1) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y) dengan partisipasi masyarakat (X_2) sebagai variabel *moderating*.

Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa t_{hitung} untuk variabel X_1-X_2 lebih kecil dari t_{tabel} yaitu sebesar $-0,798 < 2,042$ dan tingkat probabilitas $> \alpha$ yaitu $0,431 > 0,05$. Karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dan tingkat probabilitasnya lebih besar dari 5%, maka H_0 diterima, berarti variabel partisipasi masyarakat tidak berperan sebagai variabel *moderating*. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah tidak terbukti kebenarannya (H_2 ditolak).

c. Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran (X_1) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y) dengan akuntabilitas publik (X_3) sebagai variabel *moderating*.

Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa t_{hitung} untuk variabel X_1-X_3 lebih kecil dari t_{tabel} yaitu sebesar $-0,724 < 2,042$ dan tingkat probabilitas $> \alpha$ yaitu $0,475 > 0,05$. Karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dan tingkat probabilitasnya lebih besar dari 5%, maka H_0 diterima, berarti variabel akuntabilitas publik tidak berperan sebagai variabel *moderating*. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah tidak terbukti kebenarannya (H_3 ditolak).

d. Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran (X_1) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y) dengan transparansi kebijakan publik (X_4) sebagai variabel *moderating*.

Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa $-t_{\text{hitung}}$ untuk variabel X_1-X_4 lebih kecil dari t_{tabel} yaitu sebesar $2,035 < 2,042$ dan tingkat probabilitas $> \alpha$ yaitu $0,224 > 0,05$. Karena $-t_{\text{hitung}}$ lebih besar dari $-t_{\text{tabel}}$ dan tingkat probabilitasnya lebih besar dari 5%, maka H_0 diterima, berarti variabel transparansi kebijakan publik tidak berperan sebagai variabel *moderating*. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah tidak terbukti kebenarannya (H_4 ditolak).

Pembahasan

Setelah dilakukan pengujian statistik secara parsial (individu) dengan menggunakan uji t, maka analisis lebih lanjut dari hasil analisis regresi adalah:

Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil uji regresi menunjukkan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dengan koefisien 0,323. Hal ini berarti dengan semakin baiknya pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah juga akan semakin baik. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah terbukti kebenarannya (H_1 diterima).

Menurut Truman (1960) dalam Sopanah dan Wahyudi (2010) mengatakan "Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Ketiganya mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat".

"Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman menyusun berbagai peraturan daerah" Sopanah dan Wahyudi (2010).

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 (6) menyebutkan bahwa : “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Halim (2001:147), tujuan pengawasan keuangan daerah secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjamin keamanan keseluruhan komponen keuangan daerah
- b. Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah
- c. Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengetahuan sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah diantaranya pengetahuan tentang anggaran. Dengan memiliki pengetahuan yang lebih tentang anggaran, diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Anggota dewan akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif jika anggota dewan memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, dan lain sebagainya.

Penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Penelitian Widyarningsih dan Pujirahayu (2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran terhadap pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Pramita dan Andriyani (2010) menunjukkan hubungan yang positif signifikan atas pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil uji regresi menunjukkan variabel partisipasi masyarakat tidak berperan sebagai variabel *moderating*. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah tidak terbukti kebenarannya (H_2 ditolak).

Hasil penelitian ini tidak sesuai dan mendukung penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003), Pramita dan Andriyani (2010), serta Yuliusman (2012). Penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) menyatakan bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Penelitian Pramita dan Andriyani (2010) membuktikan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Penelitian Yuliusman (2012) juga membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan

antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD.

Partisipasi masyarakat berpengaruh tidak signifikan terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, karena partisipasi masyarakat pada saat ini lebih mengacu pada dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kebutuhan yang telah dibuat oleh pemerintah, bukan untuk mendengar permasalahan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat itu sendiri. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Juliastuti (2013) yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa “Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka tidak berpengaruh pada pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah”.

Hubungan Akuntabilitas Publik dengan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil uji regresi menunjukkan variabel akuntabilitas publik tidak berperan sebagai variabel *moderating*. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah tidak terbukti kebenarannya (H_3 ditolak).

Hasil penelitian ini tidak sesuai dan mendukung penelitian Pramita dan Andriyani (2010) membuktikan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Penelitian Sopanah dan Wahyudi (2010) menyatakan bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD.

Akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, karena pada saat ini tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat sulit ditemukan terutama di Indonesia. Hal ini juga disebabkan karena ketidakmampuan pemerintah dalam menerapkan akuntabilitas yang baik sehingga dapat menyebabkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Implementasi tentang akuntabilitas di Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.”. Maka, setiap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah harus terdapat visi dan misi serta penilaian mengenai hasil dan manfaat yang telah diraih. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Juliastuti (2013) bahwa “pada saat ini akuntabilitas hanya terbatas pengelolaan keuangan daerah saja, belum adanya penilaian terhadap hasil dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sehingga hal ini tidak memberikan pengaruh terhadap anggota dewan dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan keuangan daerah”.

Hubungan Transparansi Kebijakan Publik dengan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil uji regresi menunjukkan variabel transparansi kebijakan publik tidak berperan sebagai variabel *moderating*. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah tidak terbukti kebenarannya (H_4 ditolak).

Hasil penelitian ini tidak sesuai dan mendukung penelitian Werimon (2007) dalam Juliastuti (2013) menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan anggota dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah karena, keterbukaan informasi mengenai keuangan daerah masih kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterbukaan akses informasi kepada masyarakat ini diperlukan agar masyarakat juga dapat mengetahui apakah anggaran yang disusun dilakukan untuk kepentingan rakyat.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sopanah dan Wahyudi (2010) yang menyatakan bahwa “transparansi kebijakan publik di wilayah Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu masih dalam taraf retorika dan implementasinya masih dalam formalitas. Akses terhadap kebijakan publik masih sulit dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya”.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diungkapkan pada pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Anggota dewan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas keuangan daerah harus memiliki pengetahuan tentang anggaran untuk dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran yang terjadi.
2. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hingga saat ini partisipasi masyarakat hanya mengacu pada dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang telah menetapkan kebijakan baru, bukan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
3. Akuntabilitas publik tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Pemerintah masih tidak mampu menerapkan akuntabilitas yang baik sehingga menyebabkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
4. Transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap hubungan pengetahuan

dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan hanya masyarakat tertentu saja yang dapat mengaksesnya.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan pengembangan penelitian selanjutnya. Berikut keterbatasan dari penelitian ini :

1. Sulit ditemuinya anggota DPRD, sehingga Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan masyarakat dalam sampel penelitian.
2. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini cukup umum digunakan, Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain untuk mengetahui lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan keuangan daerah misalnya persepsi Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP).

Daftar Pustaka

- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Indriantoro, N., dan Supomo, B. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Juliastuti, Ayu. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Keputusan Presiden Nomor 74 Pasal 1 (6). 2001. *Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Pramita, D. Y., dan Andriyani, L. 2010. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewanpada Keuangan Daerah (APBD)*. Universitas Muhammadiyah Malang. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.
- Riduwan. 2005. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung : Alfabeta.
- Sopanah dan Mardiasmo. 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Universitas Widya Gama Malang dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Sopanah dan Wahyudi, I. 2010. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Universitas Widya Gama Malang dan Malang Corruption Watch (MCW).
- Ulum, Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 17 Pasal 14 Ayat (2). 2003. *Keuangan Negara*.
- Werimon, S., dkk. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Tranparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan*

Keuangan Daerah. Artikel Simposium Nasional Hasil Penelitian Akuntansi 10. Makasar.

Widyaningsih, A., dan Pujirahayu, I. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Jawa Barat.

www.jemberpost.com

Yuliusman. 2012. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran Dengan Pengawasan APBD*. Fakultas Ekonomi Universitas Jambi.

